



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

Jumat, 3 September 2021
Edisi: 00226434/GBP/IX/2021

KLIPING

Berita Pertanian



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM. No 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Telp. (021) 7806 131 Ext. 2303, 2308, Email : humas-ip@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

JUM'AT, 3 SEPTEMBER 2021

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. HORTIKULTURA :
 - Produksi Porang Digenjot dari Hutan (K)..... 1
2. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :
 - Sapi Perah Menjadi Peluang (BI)..... 2
3. PERKEBUNAN :
 - Ekspor Rempah Indonesia Potensial (BI)..... 3
 - Wapres Dorong Petani Sawit Rakyat Masuk Bisnis Hilir (ID)..... 4-5
4. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN :
 - Bendungan Way Sekampung Tingkatkan Produksi Petani (MI)..... 6
 - Harga Gabah di Tingkat Petani Meningkat, NTP Agustus Naik (R)..... 9-10
 - NTP Agustus Capai 104,68 Bukti Kesejahteraan Petani Membaik (MI)..... 11-12
 - NTP Agustus 2021 Capai 104,68, Bukti Kesejahteraan Petani Membaik (K)..... 13-14
5. KETAHANAN PANGAN :
 - BPN untuk Tuntaskan Karut-Marut Pangan (ID)..... 7
 - Bulog Tambah Gudang Distribusi Daring (ID)..... 8

00000000 O 00000000

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 3/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☒ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Rengublika | | ☐ Pojok/Karikatur |

AGROFORESTRI

Produksi Porang Digenjot dari Hutan

JAKARTA, KOMPAS — Potensi produksi umbi porang masih terbuka untuk terus ditingkatkan. Kebutuhan lahan tanamnya bisa memanfaatkan area kawasan hutan yang diperuntukkan bagi perhutanan sosial.

Menanam tanaman budidaya pertanian di area hutan atau disebut agroforestri di area perhutanan sosial dimungkinkan dengan mengikuti kaidah tertentu. Di antaranya, penanaman tanaman pertanian dikombinasikan dengan tanaman tegakan atau berkayu.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto mengemukakan, produktivitas tanaman pangan di kawasan hutan dengan pola agroforestri menunjukkan porang sangat prospektif dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya.

Berdasarkan kajian Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK pada 2018, produktivitas padi 4,98 ton per hektar (ton/ha), jagung 4,5 ton/ha, dan kedelai 1,4 ton/ha. Sementara dari hasil kajian Balai Litbang Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian (Kementan) 2015, produktivitas porang mencapai 20 ton/ha.

"Jika dilihat dari peta indikator areal perhutanan sosial, terdapat 14 juta hektar yang cocok dikembangkan untuk tanaman porang. Prospek porang juga mencapai 64 persen. Jadi, masih ada ruang yang bisa kita dorong untuk pengembangan porang dengan kerja sama para pihak," tuturnya dalam webinar bertajuk "Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Porang pada Areal Perhutanan Sosial", Kamis (2/9/2021).

Hingga 10 Agustus 2021,

program perhutanan sosial telah mencapai 4,72 juta ha yang tersebar di 721 lokasi di Indonesia. Adapun kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) hingga 15 Juni terbentuk 7.780 unit dengan komoditas agroforestri (56 persen), buah-buahan (10 persen), wisata alam (8 persen), kayu-kayuan (6 persen), kopi (6 persen), dan komoditas lainnya.

Sampai saat ini, terdapat 51 KUPS di 10 provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, yang mengembangkan porang. Luas lahan potensial untuk tanaman porang dari 51 KUPS tersebut mencapai 16.913 ha, tetapi baru 1.518 hektar yang ditanami porang.

Potensial dikembangkan

Dari karakteristiknya, porang merupakan tanaman yang adaptif dengan air terbatas dan memiliki kemampuan hidup di bawah naungan. Porang juga sangat menjanjikan untuk dikembangkan karena tidak membutuhkan biaya pemeliharaan yang besar, dapat tumbuh di lahan yang tidak produktif, dan tidak perlu berkompetisi dengan tanaman pangan lain.

Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementan Amiruddin Pohan mengatakan, porang merupakan tanaman yang mudah dibudidayakan dan biasanya tumbuh di bawah tegakan jati pada ketinggian 100-600 meter di atas permukaan laut. Porang yang masih berusia 1 tahun dapat memproduksi 10 ton/ha.

Produk olahan porang yang banyak didistribusikan dan diekspor selama ini berbentuk keripik kering dan tepung glu-

komannan. Total terdapat 21 produk olahan porang mulai dari tepung, mi, pasta, roti, kue, bahan kosmetik, hingga pembalut. Adapun total ekspor porang ke 16 negara pada 2020 mencapai Rp 923,6 miliar.

Saat ini Kementan juga telah menyusun peta jalan budidaya dan ekspor porang tahun 2020-2024. Kementan mencatat, luas eksisting pengembangan porang di semua wilayah sampai 2021 mencapai 47.000 ha dan ditargetkan meningkat hingga 100.000 ha pada 2024.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Asep Asmara mengatakan, ekspor porang tahun 2020 meningkat 23,35 persen dari tahun sebelumnya dengan tujuan utama ke China, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Belanda. Adapun tren ekspor porang selama 2016-2020 meningkat 40,19 persen. (MTK)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 9/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

| PETERNAK MILENIAL |

Sapi Perah Menjadi Peluang

Bisnis, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Koperasi Peternakan Susu Bandung Selatan (KPBS) menginisiasi pemanfaatan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank BJB bagi petani milenial sapi perah KPBS.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan kerja sama tersebut selaras dengan upaya Pemda Provinsi Jabar untuk meregenerasi petani, peternak, dan petambak di Jabar.

"Kami berharap, pasca-Covid-19 ini, generasi-generasi muda tertarik di bidang peternakan agar kita punya regenerasi petani, peternak, petambak, yang datang dari generasi Z atau generasi milenial," katanya secara daring dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (2/9).

Pemanfaatan DPLK Bank BJB diawali dengan pemberian buku rekening dana pensiun

dari Bank BJB kepada 10 petani milenial sapi perah KPBS di Kantor KPBS Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Adapun, DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan ataupun pekerja mandiri. B. 4

Salah satu manfaat dari DPLK yakni jaminan kesinambungan penghasilan pada masa pensiun atau hari tua.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengapresiasi pemanfaatan DPLK bagi petani milenial sapi perah KPBS. Menurutnya, pemanfaatan DPLK dapat mendorong petani milenial untuk terus berinovasi sekaligus mengolah peluang usaha menjadi penghasilan.

"Semoga ini bisa lancar dan bisa terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Bandung, khususnya dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata Dadang.

Hal senada dikatakan Ketua KPBS Pangalengan Aun Gunawan. Dia berharap dengan adanya pemanfaatan DPLK, minat generasi muda atau milenial untuk beternak semakin tinggi. Apalagi, katanya, regenerasi peternak masih menjadi persoalan.

Saat ini, jumlah peternak sapi perah yang tergabung dalam KPBS Pangalengan mencapai 4.000 orang dengan 13.000—14.000 ekor sapi induk. Dari jumlah tersebut, hanya 211 peternak sapi perah dari generasi milenial.

"Salah satu permasalahan yang kami alami adalah regenerasi peternak. Sehingga sebagai solusi kami membentuk kelompok peternak sapi milenial sebagai generasi penerus," kata Aun. (H57)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 3/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

| PERDAGANGAN LUAR NEGERI |

Ekspor Rempah Indonesia Potensial

Bisnis, JAKARTA — KBRI Washington D.C. membuka peluang kerja sama antara pengusaha dalam negeri dengan Amerika Serikat untuk ekspor bumbu dan rempah asli Indonesia seiring dengan peningkatan nilai perdagangan produk tersebut.

Kuasa Usaha Ad-Interim (KUAI)/ Wakil Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Iwan Freddy Hari Susanto mengatakan Amerika Serikat memiliki pangsa pasar yang besar untuk produk rempah-rempah dari Indonesia. Nilai ekspor rempah-rempah Indonesia ke Amerika Serikat pada 2020 mencapai US\$175 juta.

Selain itu, pada periode Januari—Juni 2021, nilai ekspor rempah-rempah Indonesia ke Amerika Serikat mengalami kenaikan 1,22 %, yaitu sebesar US\$83,25 juta.

"Hal ini membuktikan bahwa peluang pasar Amerika Serikat untuk produk rempah-rempah Indonesia masih sangat tinggi," ujar Iwan Freddy melalui keterangan resmi, Kamis (2/9).

Adapun, pasar Amerika Serikat merupakan pasar yang sangat ketat dan kompetitif. Untuk itu, lanjutnya, patuh pada regulasi adalah salah satu kunci penting menembus pasar Amerika Serikat.

Konsultan Badan Makanan dan Obat AS (FDA) Agus Setiawan menyampaikan berbagai regulasi

dan persyaratan ekspor produk rempah-rempah ke Amerika Serikat. "Pelabelan merupakan salah satu persyaratan yang penting untuk dipatuhi agar dapat menembus pasar Amerika Serikat," tutur Agus.

Sementara itu, pakar kuliner senior William Wongso mengusulkan konsep *cloud kitchen* "Indonesia Makan", di mana para pebisnis kuliner Indonesia di Amerika Serikat dapat menghadirkan produk makanan dan bumbu Indonesia dalam satu tempat sehingga dapat menekan biaya.

Dia juga memperkenalkan konsep Indonesia Food outlet di Amerika Serikat sebagai upaya mengindustrialisasi makanan dan bumbu Indonesia di Amerika Serikat.

"Kita semua perlu bersinergi untuk mengindustrialisasi makanan dan bumbu Indonesia di Amerika Serikat," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam kegiatan ekspor rempah.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi menuturkan rempah Indonesia yang bernilai tambah bisa meningkatkan daya saing di pasar internasional. 31.5

"Diperlukan pengembangan produk agar sesuai dengan permintaan pasar internasional." (Nindy Aldila)

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 3/9/2021
HALAMAN 1
RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Berita Foto
☐ Opini/Artikel
☐ Tajuk
☐ Pojok/Karikatur |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | |

Wapres Dorong Petani Sawit Rakyat Masuk Bisnis Hilir

Oleh Ridho Syukra

► JAKARTA – Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong petani sawit rakyat untuk mulai masuk ke industri hilir guna meningkatkan pendapatan dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja. Para petani sawit rakyat bisa memulainya dengan membangun pabrik kelapa sawit (PKS) skala usaha mikro kecil menengah (UMKM). Saat ini, petani rakyat menguasai sekitar 41,35% luas perkebunan sawit Indonesia dengan produksi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) sebesar 16,20 juta ton atau 34% dari total produksi nasional.

Wapres Ma'ruf menjelaskan, petani sawit terutama petani swadaya merupakan aktor utama dari subsektor perkebunan sawit nasional karena mereka menguasai hampir separuh perkebunan sawit RI. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 saja, dari 14,60 juta ha perkebunan sawit di Tanah Air sekitar 6,04 juta ha dimiliki para petani sawit rakyat atau disebut perkebunan sawit rakyat. Karena itu, pemerintah memandang penting untuk memberikan perhatian khusus kepada perkebunan rakyat, terutama untuk lebih meningkatkan kesejahteraan

petani yang terlibat di dalamnya.

Guna meningkatkan nilai tambah, kata Wapres, perkebunan sawit rakyat harus mulai masuk ke industri hilir demi menaikkan pendapatan dan peluang pengembangan usaha lebih luas. Dalam hal ini, UMKM sawit merupakan sarana yang tepat bagi perkebunan rakyat untuk masuk ke industri hilir. "Produksi skala UMKM tidak saja menjadi nilai tambah bagi petani tapi juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas karena beragamnya produk turunan sawit di Indonesia," kata Wapres saat Panen Perdana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Peresmian Panangkaran Bibit

Kelapa Sawit Program UMKM Santripreneur yang digelar daring dari Jakarta dan luring dari Rokan Hilir, Riau, Kamis (2/9). Panen perdana mencakup lahan seluas 266 ha dengan melibatkan 105 keluarga petani sawit swadaya, areal itu bagian dari program PSR yang dicanangkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada 2017 lalu.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, hingga kini perkebunan atau petani sawit rakyat yang menguasai lahan hingga seluas 6,78 juta ha belum mempunyai satu pun PKS. Perkebunan rakyat masih bergantung sepenuhnya kepada PKS milik korporasi. Sementara itu, dana pungutan ekspor yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk tahun ini saja diperkirakan Rp 117 triliun, akan lebih baik apabila dana itu juga diarahkan untuk pembangunan PKS. "Kami mohon Pak Wapres mengarahkan BPDPKS agar membantu membangun pabrik di lokasi panen perdana ini agar petani sumringah," ujar dia.

Lebih jauh Wapres menjelaskan, sedikitnya terdapat tiga klaster perkebunan rakyat yang perlu dikelola dengan baik demi meningkatkan nilai tambah dan perbaikan kesejahteraan petani nasional di dalamnya. *Pertama*, penguatan sektor hulu melalui pembibitan dan pengolahan selama masa tanam, peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat, serta pengembangan



Ma'ruf Amin

tanaman sela dan integrasi dengan ternak (pertanian terintegrasi/integrasi sawit-sapi). "Untuk peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat, pemerintah telah mencanangkan program PSR, produktivitas sawit rakyat memang masih tergolong rendah, yaitu 3,70 ton CPO per ha per tahun padahal potensinya bisa 8 ton per ha per tahun," jelas dia.

Kedua, memperkuat industri hilir melalui penguatan permodalan, pengembangan, dan pengelolaan produksi sawit pascapanen, hilirisasi atau pengembangan/pengolahan produk turunan dengan nilai tambah tinggi, pengembangan pemasaran dan penguatan pasar sawit, serta tetap menjaga harga CPO. *Ketiga*, lanjut Wapres, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembi-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 3/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

nanaan, pelatihan, magang, studi banding, dan konsultasi manajemen usaha serta penguasaan teknologi untuk memperbaiki sistem produksi dan kontrol kualitas, pengembangan desain dan rekayasa produk, peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, juga pemerataan teknologi untuk pemasaran.

Percepatan PSR

Dalam kesempatan itu, Wapres mendorong percepatan program PSR. PSR merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat sekaligus bentuk keprihatinan pemerintah kepada pekebun sawit, PSR juga merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di masa pandemi. "Sampai 2022, pemerintah menargetkan PSR pada lahan seluas 540 ribu ha dan tahun ini menyasar 180 ribu ha dengan alokasi dana Rp 5,57 triliun. Untuk mencapai target itu, pemerintah bersama pemangku kepentingan industri

sawit perlu bersatu padu, bekerja bersama, dan berkolaborasi. Perlu kerja sama erat tiga pihak dalam rangka pengelolaan sawit berkelanjutan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat," jelas Wapres.

Sebagai penghasil sawit terbesar di dunia dan menguasai 55% pasar ekspor global, industri dan perkebunan sawit Indonesia mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Industri sawit mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, pada 2019 saja, petani yang terjun langsung dan bekerja di perkebunan sawit 2,67 juta orang dan tenaga kerja tidak langsung 4,40 juta orang. Pada 2020, ekspor pertanian tumbuh 15,70% atau mencapai Rp 451,77 triliun dan khusus ekspor sawit US\$

22,97 miliar atau setara Rp 321,50 triliun. "Peran sawit besar buat ekonomi nasional," jelas Wapres.

Sedangkan Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengatakan, di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 44 PKS yang mengolah sawit, Rokan Hilir merupakan penghasil sawit terbesar di Provinsi Riau. Namun demikian, sebagian besar kebun sawit di Rokan Hilir saat ini justru dinyatakan masuk pada kawasan hutan, hal inilah yang kemudian menghambat realisasi PSR di kabupaten tersebut, dari target 5.000 ha baru terealisasi 1.500 ha. "Kami berharap kebun sawit di kawasan hutan ini dilepaskan sehingga petani dapat memiliki lahan secara utuh dan proses replanting bisa dilaksanakan dengan baik," kata Afrizal.

Terkait legalitas lahan pekebun sawit yang menjadi penghambat PSR, Wapres Ma'ruf meyakini dengan langkah proaktif para petani sawit rakyat untuk memenuhi ketentuan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), asistensi dari pemerintah daerah (pemda), dan upaya jemput bola dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maka persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. "Dalam UUCK itu sudah diatur solusi penyelesaian untuk kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan, bahkan sudah ada peraturan pemerintah (PP) untuk UUCK. Jadi kalau semua proaktif dan saling berkomunikasi, bekerja sama, kesulitan itu bisa diatasi," ujar Wapres. (tl)

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☒ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 3/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 2/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☒ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

Bendungan Way Sekampung Tingkatkan Produksi Petani

KEHADIRAN Bendungan Way Sekampung di Pringsewu, Lampung, harus bisa memberi manfaat nyata kepada masyarakat, terutama para petani. Infrastruktur tersebut harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi pertanian.

"Kita harap bendungan ini bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama dalam rangka mendukung produksi petani," kata Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bendungan Way Sekampung di Lampung, kemarin.

Dengan kapasitas tampung mencapai 68 juta meter kubik, waduk yang dibangun dengan dana Rp1,78 triliun itu bisa mengairi 55.000 hektare saluran irigasi *existing* dan 17.000 daerah irigasi baru.

Kepala Negara pun berpesan kepada para menteri terkait serta pemerintah daerah setempat untuk menyinergikan bendungan dengan seluruh saluran irigasi, dari primer, sekunder, tersier, hingga kuarter.

"Dengan manajemen air yang baik

dari hulu sampai hilir, lumbung pangan nasional kita dapat terjaga keberlanjutannya. Intensitas tanam bisa meningkat dari semula dua kali tanam menjadi tiga kali tanam setahun. Artinya produksi akan meningkat dan kita harapkan kesejahteraan petani ikut terangkat," jelas mantan Wali Kota Solo itu.

Sedanya, selain berfungsi mendukung pengembangan sektor pertanian, Bendungan Way Sekampung juga memiliki sejumlah peranan lain, yakni sebagai penyedia air baku sebesar 2,73 liter per detik, pembangkit listrik sebesar 5,4 megawatt, serta pengendali banjir.

Presiden Jokowi mengawali kunjungan kerja di Lampung dengan meninjau pelaksanaan vaksinasi massal covid-19 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Lampung Selatan. Kegiatan vaksinasi tersebut ditujukan bagi 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selepas itu, Jokowi melanjutkan perjalanan ke SMA Negeri 2 Kota Bandar Lampung untuk melihat pelaksanaan penyuntikan vaksin kepada para pelajar, juga vaksinasi massal di SMPN 1 Pesawaran, Lampung. M. 2

"Kita harapkan secepatnya para murid bisa segera ikut dalam pembelajaran tatap muka. Karena itu, harus ada perlindungan maksimal kepada para murid sehingga bisa mengurangi penyebaran covid-19 di sekolah-sekolah," ujarnya.

Turut mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. (Pra/X-7)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 3/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

BPN untuk Tuntaskan Karut-Marut Pangan

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyatakan bahwa Badan Pangan Nasional (BPN) diperlukan untuk menyelesaikan karut-marut tata kelola pangan nasional. BPN bertugas menyinergikan atau mengolaborasi badan-badan pangan yang berada di tingkat kementerian, menjadi satu lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur ketersediaan dan tata niaga pangan dari hulu hingga hilir dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Firman yang juga anggota Baleg DPR itu menjelaskan, karut-marut pangan dirasakan usai Bulog berubah menjadi perusahaan umum (perum) yang berorientasi komersial alias cari untung, tidak lagi menjadi penyangga pangan. Sementara itu, pangan menurut amanat konstitusi harus dikuasai negara dan mengacu Deklarasi PBB maka pangan adalah hak asasi. "Dengan pandemi kita diingatkan lagi urgensi pangan bagi Indonesia, jangan tergantung impor, seperti gula dan garam, inilah kenapa BPN perlu untuk bisa menyelesaikan karut-marut pangan, dijalankan sesuai UU No 18 Tahun 2012 tentang

Pangan," papar dia saat dihubungi *Investor Daily* di Jakarta, kemarin.

Karena itu, pada masa sidang lalu, DPR telah melakukan inisiasi pemantauan pelaksanaan UU Pangan guna mendesak pemerintah segera membentuk BPN seperti yang diamanatkan UU Pangan. "Nah, sekarang Presiden Jokowi sudah mengeluarkan regulasi pembentukan BPN itu melalui Perpres No 66 Tahun 2021 tentang BPN. Selanjutnya, kita lihat apakah dalam pembentukan itu sudah sesuai amanat UU Pangan. Kita tunggu Presiden melantik Kepala BPN dan nanti akan kami tanya seperti apa peta jalan (*road map*) pangan yang disiapkannya, baru nanti kita bisa lihat apakah BPN yang dibentuk ini sudah sesuai amanat UU Pangan, kalau belum tentu harus disempurnakan, jangan mengulang kondisi yang sama," kata Firman.

Salah satu amanat penting UU Pangan adalah BPN tidak hanya sebagai penyangga stok (*buffer stock*) dan stabilisator harga pangan, tapi juga menjadi regulator sekaligus eksekutor. BPN juga harus berinovasi dengan berkolab-

orasi bersama perguruan tinggi, pakar, ahli pangan, untuk membuat kajian diversifikasi, sehingga pangan pokok masyarakat Indonesia tidak hanya beras tapi budaya pangan lokal dikembangkan, tinggal kebutuhan proteinnya didukung pemerintah. "Kita lihat apakah BPN ini sejalan dengan UU atau tidak, kalau belum percuma," ujar dia.

Firman juga menuturkan, saat ini pangan menganut pasar bebas sehingga kerap memicu permainan pedagang atau tengkulak. Sudah seharusnya ke depan BPN bisa mengendalikannya dengan menerapkan sistem harga atas dan bawah sehingga tidak ada permainan di pasar, petani bisa menikmati harga secara keekonomian dan tidak terjadi lonjakan pangan impor. "Jadi, kita tunggu, apakah BPN yang dibentuk ini hanya memindahkan peran, misalnya apakah impor masih dikendalikan oleh Kementerian Perdagangan atau BPN. Dengan kehadiran BPN juga jangan sampai nanti malah tumpang tindih atau semrawut, sekarang kan ada Bulog, tapi ada juga nanti *holding* BUMN pangan," ungkap Firman. (d) 10.7

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 4/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Bulog Tambah Gudang Distribusi Daring

JAKARTA – Perum Bulog bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-76 menambah tiga Gudang Distribution Center (GDC) untuk memperkuat layanan *e-commerce* perusahaan, yakni di Bogor, Tangerang, dan Karawang. Penambahan GDC baru di tiga kota tersebut dilakukan untuk memudahkan akses sembako berkualitas dan terjangkau kepada masyarakat yang dilakukan dengan mudah secara *online* melalui platform *shopee iPangananDotCom*.

Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengatakan, kebutuhan masyarakat yang meningkat pada masa pandemi Covid-19 akan semakin mudah terpenuhi dengan penambahan gudang *iPangananDotCom* tersebut.

Dengan dibantu teknologi terkini yang cepat, mudah, dan efisien, pesanan dikirim ke depan rumah dalam 1 x 24 jam bebas ongkos kirim melalui *iPangananDotCom*. “Memasuki usia *iPangananDotCom* yang kedua tahun pada Agustus 2021, kami lakukan ekspansi dengan penambahan tiga GDC *iPangananDotCom* guna menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan sembako pada masa pandemi,” ujar Febby.

Dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru ini, Febby menjelaskan, platform *iPangananDotCom* sendiri merupakan buah hasil kolaborasi antara Perum Bulog dan StoreSend Indonesia. Kolaborasi ini dilakukan guna mendatangkan

digitalisasi pangan yang modern di Tanah Air serta menjadi penyedia *online food community* terbesar di Indonesia. Pada saat ini, *iPangananDotCom* telah hadir di Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar yang dapat diakses melalui *Shopee* oleh masyarakat. “*iPangananDotCom* diharapkan menjadi *king market* atau *supermall* bahan pangan *online* yang terbesar di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat mendapatkan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan biaya yang murah terlebih dalam situasi pandemi seperti saat ini,” tegas Febby.

Sementara itu, menyikapi situasi pandemi Covid-19, pada

Jumat (20/8), Bulog menggelar seminar daring penerapan gaya hidup sehat berkelanjutan melalui asupan makanan yang sehat dan kaya nutrisi dengan menggunakan produk unggulan Bulog yaitu beras fortivit atau beras bervitamin. Melalui seminar itu diharapkan makin mengenalkan beras fortivit sebagai beras sehat yang bisa menjadi salah satu alternatif preferensi masyarakat yang sangat bermanfaat dikonsumsi oleh komunitas paramedis yang berjuang di garda terdepan pada masa pandemi serta sangat cocok bagi ibu hamil untuk mencegah bayi cacat lahir, perempuan remaja untuk mencegah anemia, juga anak-anak untuk mengatasi *stunting* atau gagal tumbuh. (dho) 10-7

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☒ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 3/8/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 3
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☐ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☒ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☒ Republika		☐ Pojok/Karikatur

Harga Gabah di Tingkat Petani Meningkatkan, NTP Agustus Naik



Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa pada bulan Agustus 2021 harga gabah di tingkat petani baik gabah kering panen dan gabah kering giling secara *month to month* (m-t-m) meningkat. Kenaikan harga gabah di tingkat petani ini juga turut diikuti oleh kenaikan nilai tukar petani (NTP).

"Selama Agustus 2021, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp4.448,00 per kg atau naik 3,19 persen," ungkap Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto, dalam konferensi pers secara daring, Rabu (01/09) siang.

Tak hanya harga GKP, Setianto juga mengungkapkan rata-rata harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani juga meningkat. "Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.038,00 per kg atau naik 3,37 persen," sebutnya.

Peningkatan harga gabah di ting-

kat petani turut diikuti oleh kenaikan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar usaha pertanian (NTUP) yang kerap dijadikan indikator kesejahteraan petani nasional. Secara keseluruhan, NTP pada bulan Agustus 2021 mencapai 104,68 atau meningkat 1,16 persen dari bulan sebelumnya. Sementara NTUP juga mengalami kenaikan, mencapai 104,80 atau meningkat 1,00 persen dari bulan sebelumnya.

Kenaikan NTP dan NTUP bulan Agustus ini tak lepas dari meningkatnya indikator kesejahteraan petani subsektor tanaman pangan.

"NTP tanaman pangan mencapai 97,65 atau meningkat 1,39 persen dibanding bulan sebelumnya. Sementara NTUP tanaman pangan mencapai 97,79 atau meningkat 1,24 persen dibanding bulan sebelumnya," sebut Setianto.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Ke-

mentan) Kuntoro Boga Andri mengungkapkan harga gabah di tingkat petani sangat penting untuk terus dijaga. Menurutnya, petani harus bisa menikmati keuntungan dari hasil produksi.

"Data bulan Agustus ini menunjukkan bahwa harga gabah di tingkat petani menjadi penting bagi penerimaan pendapatan petani. Karena itu, gabah di tingkat petani harus bisa diserap dengan harga yang bisa menguntungkan bagi mereka," jelas Kuntoro.

Harga gabah di tingkat petani yang terbilang baik pada bulan ini juga masih diikuti dengan stabilnya harga dan tersedianya stok beras di pasar.

"Berdasarkan data BPS, harga beras



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|---|--|-----------|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 3/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 3 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |



Kementan selalu fokus menangani produktivitas dan budidaya. Sementara itu, soal harga dan stabilitas pangan pun ditangani bersama dengan kementerian dan lembaga lain

di tingkat grosir dan eceran masih cenderung stabil, yaitu sedikit menurun dibanding bulan sebelumnya, masing-masing sebesar 0,08 persen dan 0,03 persen," ujar Kuntoro.

Dari sisi produksi dan stok beras pun kondisi masih sangat sangat terkendali. Sampai dengan pekan ketiga Agustus 2021, stok beras nasional mencapai 7,60 juta ton, masing-masing tersebar di penggilingan 1,52 juta ton, pedagang 708 ribu ton, dan Bulog sebesar 1,16 juta ton.

Menurut Kuntoro, Kementan selalu fokus menangani produktivitas dan budidaya. Sementara itu, soal harga

dan stabilitas pangan pun ditangani bersama dengan kementerian dan Lembaga lain.

"Kementan terus berupaya mendorong hilirisasi produk pertanian agar memiliki nilai tambah sehingga petani pun bisa memiliki keuntungan yang layak seraya produksi pun terus meningkat. Sesuatu yang perlu kita syukuri, produksi beras selama kurang lebih dua tahun ini aman terkendali," pungkasnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menambahkan, peningkatan harga gabah di tingkat petani yang memicu peningkatan NTP adalah penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) yang mampu meningkatkan produktivitas petani.

Sebagaimana diketahui, penggunaan alsintan dapat mengurangi *losses* saat petani melakukan penggilingan padi sekitar 20-40 persen. "Alsintan menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya harga gabah di tingkat petani," tutur Ali.

Pada saat sama, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian juga memperkuat NTP karena petani memiliki permodalan yang cukup dalam mengolah budidaya pertanian mereka.

"Dengan KUR Pertanian, petani memiliki sumber modal yang cukup baik dalam mengembangkan budidaya pertanian mereka," ujar Ali. ● ril



2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 3/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

NTP Agustus Capai 104,68 Bukti Kesejahteraan Petani Membaik

BADAN Pusat Statistik (BPS) merilis nilai tukar petani (NTP) pada Agustus 2021 naik secara nasional sebesar 1,16% dibandingkan dengan NTP Juli 2021 yaitu dari 103,48 menjadi 104,68 (*month to month/MtoM*).

Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 1,17%, lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,01%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto menyampaikan ada 2 subsektor pendukung yang membuat NTP pada Agustus lalu mengalami kenaikan, yaitu subsektor tanaman pangan yang naik sebesar 1,39% dan tanaman perkebunan rakyat 2,90%.

"Secara nasional, NTP Januari-Agustus 2021 lebih tinggi 2,23% dibandingkan dengan NTP periode sama pada 2020. Perubahan tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 14,73%," ungkap Setianto dalam keterangan persnya, Rabu (1/9).

Peningkatan NTP juga turut diikuti oleh peningkatan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) sebesar 104,8 atau naik 1,00% (MtoM).



DOK KEMANTAN

Sama seperti NTP, peningkatan NTUP turut dipicu oleh kinerja positif NTUP subsektor tanaman pangan dan perkebunan rakyat masing-masing naik 1,28% dan 2,58%.

"Pada Agustus 2021, NTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan tertinggi yaitu 3,68% dibandingkan dengan kenaikan NTP provinsi lainnya," ungkapnya.

Dalam keterangan persnya, BPS juga merilis perkembangan harga gabah baik di tingkat petani maupun di tingkat penggilingan. Selama Agustus rata-rata harga Gabah

Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.448 per kilogram (kg) atau naik 3,19% (MtoM) dan di tingkat penggilingan Rp4.545 per kg atau naik 3,12% dibandingkan dengan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, untuk rata-rata harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani Rp5.038 per kg atau naik 3,37% dan di tingkat penggilingan Rp5.148 per kg atau naik 2,92%.

Penggunaan alsintan

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri mengatakan kenaikan yang konsisten

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 3/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

"Salah satu prasarana dan sarana pertanian yang menjadi faktor pengungkit adalah alat mesin pertanian (alsintan)."

pada nilai NTP dan NTUP merupakan salah satu indikator bahwa tingkat kesejahteraan petani terus membaik serta dapat menjadi bukti bahwa sektor pertanian selalu bertumbuh khususnya di tengah pandemi covid-19.

"Nilai NTP dan NTUP sepanjang 2021 terus meningkat. Ini menjadi pertanda baik bagi indikator kesejahteraan petani," katanya.

Direktur Jenderal Prasa-

rana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menambahkan salah satu faktor penting meningkatnya NTP petani adalah penggunaan prasarana dan sarana yang baik. Menurutnya, hal tersebut mendukung produktivitas pertanian berkembang cukup baik. Salah satu prasarana dan sarana pertanian yang menjadi faktor pengungkit adalah alat mesin pertanian (alsintan).

"Penggunaan alsintan oleh petani mempercepat proses budidaya dari hulu hingga hilir. Alsintan dapat menekan losses (kerugian) hingga 20%-40% sehingga produktivitas meningkat," ujar Ali.

Hal lainnya adalah fasilitas pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian. "Dengan adanya KUR Pertanian, petani kini memiliki *back-up* modal dalam mengembangkan budidaya pertanian mereka," pungkas Ali. (RO/S3-25)



2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 3/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tari | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☒ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

NTP Agustus 2021 Capai 104,68, Bukti Kesejahteraan Petani Membaik

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai tukar petani (NTP) pada bulan Agustus 2021, NTP secara nasional naik 1,16 persen dibandingkan NTP Juli 2021, yaitu dari 103,48 menjadi 104,68 (MtoM). Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 1,17 persen, lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,01 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan, ada 2 subsektor pendukung yang membuat NTP di bulan Agustus mengalami kenaikan, yaitu sub sektor tanaman pangan yang naik sebesar 1,39 persen dan tanaman perkebunan rakyat 2,90 persen.

"Secara nasional, NTP Januari-Agustus 2021 lebih tinggi 2,23 persen dibandingkan NTP Tahun 2020 pada periode yang sama. Perubahan tertinggi terjadi pada Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 14,73 persen," ungkap Setianto, Rabu (1/9/2021).

Peningkatan NTP juga turut diikuti oleh peningkatan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) sebesar 104,8 atau naik 1,00 persen (MtoM). Sama seperti NTP, peningkatan NTUP turut dipicu oleh kinerja positif NTUP subsektor tanaman pangan dan perkebunan rakyat masing-masing naik 1,28 persen dan 2,58 persen.

"Pada Agustus 2021, NTP



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan tertinggi yaitu 3,68 persen dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya," ungkapnya. **K. 4**

BPS juga merilis perkembangan harga gabah baik di tingkat petani maupun di tingkat penggilingan. Selama bulan Agustus, rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp4.448,00 per kg atau naik 3,19 persen (MtoM) dan di tingkat penggilingan

Rp4.545,00 per kg atau naik 3,12 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani Rp 5.038,00 per kg atau naik 3,37 persen dan di tingkat penggilingan Rp5.148,00 per kg atau naik 2,92 persen.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri mengatakan, kenaikan

yang konsisten pada nilai NTP dan NTUP merupakan salah satu indikator bahwa tingkat kesejahteraan petani terus membaik serta dapat menjadi bukti bahwa sektor pertanian selalu bertumbuh khususnya di tengah pandemi Covid-19.

"Nilai NTP dan NTUP sepanjang 2021 terus meningkat. Ini menjadi pertanda baik bagi indikator kesejahteraan petani," katanya.

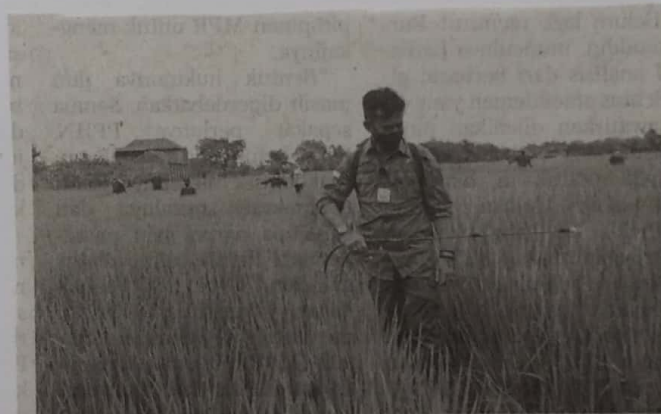
KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 3/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 91 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian Ali Jamil menambahkan, salah satu faktor penting meningkatnya NTP petani adalah penggunaan prasarana dan sarana yang baik. Menurut Ali, hal tersebut mendukung produktivitas pertanian berkembang cukup baik. Salah satu prasarana dan sarana pertanian yang menjadi faktor pengungkit adalah alat mesin pertanian (alsintan).

"Penggunaan alsintan oleh petani mempercepat proses budidaya dari hulu hingga hilir. Alsintan dapat menekan losses hingga 20-40 persen, sehingga produktivitas meningkat," ujar Ali.

Hal lainnya adalah fasilitas pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian. "Dengan KUR Pertanian, petani memiliki back-up modal dalam mengembangkan budidaya pertanian mereka," tutur dia. [*]

2